



PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN PANDEGLANG

Rafly Wiraatmaja¹

¹Universitas Serang Raya

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 12, 2026

Revised April 02, 2026

Accepted May 30, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci :

Peran, Anggota Legislatif,
Kesejahteraan Masyarakat

Keywords:

Role, Legislative Members,
Community Welfare



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Author. Published
by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Indonesia, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari lembaga legislatif memainkan peran penting dalam memperkuat proses demokrasi di tingkat daerah. DPRD berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang bertugas menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggota legislatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang masih perlu ditingkatkan agar merata di seluruh kecamatan. Dengan luasnya wilayah dan kebutuhan masyarakat yang beragam, pembangunan infrastruktur yang baik akan mendukung mobilitas, distribusi ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan logistik. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai target, sehingga rencana peningkatan infrastruktur di tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang secara menyeluruh. DPRD memiliki peran penting sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Melalui fungsi legislatif, anggota dewan bertanggung jawab memastikan kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat serta memperhatikan berbagai permasalahan sosial yang ada. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang berbasis evaluasi dan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Pandeglang dapat terus meningkat..

ABSTRACT

In Indonesia, the existence of the Regional People's Representative Council (DPRD) as part of the legislative body plays an important role in strengthening the democratic process at the regional level. The DPRD functions as the people's representative whose task is to voice the interests of the community in the process of formulating regional policies. This research aims to analyze the role of legislative members in improving the welfare of the people of Pandeglang district. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection carried out in this research was interviews and observations. The research results show that infrastructure development in Pandeglang Regency still needs to be improved so that it is evenly distributed across all sub-districts. With the vast area and diverse community needs, good infrastructure development will support mobility, economic distribution and community welfare, especially in the agricultural and logistics sectors. The regional government and DPRD have an important role in ensuring that development runs effectively and according to targets, so that the plan to improve infrastructure in 2025 is a strategic step to encourage economic growth and prosperity of the Pandeglang community as a whole. The DPRD has an important role as the people's representative in fighting for the welfare of the people of Pandeglang Regency. Through legislative functions, council members are responsible for ensuring that the policies adopted truly bring benefits to society and pay attention to various existing social problems. Synergy between the DPRD and regional governments is the key to creating policies that are effective and oriented towards people's welfare. With an evaluation-based approach and good cooperation between the legislature and the executive, it is hoped that development and community welfare in Pandeglang can continue to increase.

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

*Corresponding author.

E-mail addresses: raflywiraatmaja@email.com

Pemerintahan Daerah secara lebih terperinci. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti Aspirasi masyarakat. Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun Aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga peranan penting. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD biasa dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah diartikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi antara lain : (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

DPRD memiliki tiga fungsi dan peran penting berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

a. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara : Pertama, membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Kedua, mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan Ketiga, menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Program pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah.

b. Fungsi anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara : Pertama, membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD. Kedua, membahas rancangan Perda tentang APBD daerah. Ketiga, membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD daerah. Keempat, membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD daerah.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : Pertama, pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah. Kedua, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketiga, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Implementasi ketiga fungsi dan peran DPRD ini harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif.

Anggota DPRD dalam perwakilannya memiliki daerah pemilihan masing-masing atau yang disingkat dengan dapil. Daerah pemilihan dibagi berdasarkan cakupan luas atau lingkup wilayah tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan sebuah hubungan keterikatan dengan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Masyarakat tersebut disebut dengan istilah "konstituen". Konstituen atau pemilih merupakan pemberi mandat kepada pihak yang diberi tanggungjawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh parlemen. Sistem pendapilan ini sangat berguna bagi

anggota DPRD maupun masyarakat, melalui sistem ini dapat teridentifikasi lebih jelas tentang siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para wakil rakyat dapat menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan daerah tertentu. Sebaliknya, para pemilih juga dapat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan daerahnya (Marijan 2010:53).

Masyarakat yang memilih wakil rakyatnya yaitu DPRD tentu mengharapkan kesejahteraan kepada mereka melalui aspirasi yang hendak ditujukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah lewat wakil rakyat dari fraksi manapun yang sudah mereka pilih. Sebagai anggota legislatif (DPRD) yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat berkewajiban menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat, dengan kedudukan sebagai anggota legislatif (DPRD). Anggota DPRD senantiasa memelihara keseimbangan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. Oleh karena itu penelitian kualitatif juga mampu memberikan kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih besar (horison, 2009). Peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang mana dalam metode ini bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu ciri daerah otonom adalah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, sebagai bentuk perwujudan demokrasi, dengan demikian pada daerah otonom terbentuk pemerintah daerah yang tujuannya mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD menjalankan pemerintahan daerah artinya, melaksanakan urusan-urusan yang telah di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun urusan yang nyata-nyata ada dan di butuhkan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tuntutan pemekaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi didalam masyarakat. Menumbuhkan dan membangun kehidupan demokrasi dilakukan dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang harus dapat diperankan oleh wakil rakyat yang ada di daerah yaitu DPRD. Peran DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat perlu dilaksanakan, supaya kebijakan pembangunan yang ada di daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah.

Hasil wawancara dengan anggota legislatif Kabupaten Pandeglang Bapak Rifqi Rafsanjani, Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang yang dinilai masih kurang optimal. Dengan luasnya wilayah yang mencakup 35 kecamatan, tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan pembangunan agar seluruh daerah mendapatkan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dasar. Hal ini mencerminkan permasalahan yang umum terjadi di daerah dengan wilayah yang luas dan tingkat pembangunan yang belum merata, di mana daerah-daerah tertentu mungkin lebih berkembang dibandingkan yang lain.

Dalam konteks pembangunan, pernyataan tersebut menyoroti bahwa infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi. Misalnya, jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan ketahanan pangan, serta memudahkan akses kendaraan besar untuk mengangkut barang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Pandeglang dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perdagangan, dan logistik.

Selain itu, pernyataan tersebut juga menggarisbawahi peran pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan pembangunan dilakukan secara merata. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjawab tantangan geografis dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang tepat, pembangunan dapat lebih

efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, fokus pada pembangunan infrastruktur di tahun 2025 menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 1
Wawancara Dewan



Peran anggota DPRD sebagai representasi masyarakat dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Pernyataan ini juga mencerminkan pemahaman bahwa banyak persoalan sosial yang masih terjadi di Pandeglang dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal penyimpangan sosial yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pengambilan kebijakan, ditekankan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada prinsip manfaat bagi masyarakat. Ini menunjukkan pendekatan yang berbasis evaluasi dan pertimbangan matang sebelum sebuah kebijakan diterapkan. Selain itu, pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif juga disoroti sebagai elemen kunci dalam pembangunan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran dalam membuat dan mengawasi kebijakan, sedangkan pemerintah daerah sebagai eksekutif bertanggung jawab dalam implementasinya.

DPRD dan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar peraturan, tetapi benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Dimana kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari legislatif agar lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, pernyataan tersebut menekankan pentingnya peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Pandeglang.

4. KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang masih perlu ditingkatkan agar merata di seluruh kecamatan. Dengan luasnya wilayah dan kebutuhan masyarakat yang beragam, pembangunan infrastruktur yang baik akan mendukung mobilitas, distribusi ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan logistik. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai target, sehingga rencana peningkatan infrastruktur di tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang secara menyeluruh. DPRD memiliki peran penting sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Melalui fungsi legislatif, anggota dewan bertanggung jawab memastikan kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat serta memperhatikan berbagai permasalahan sosial yang ada. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang berbasis evaluasi dan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Pandeglang dapat terus meningkat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, A., & As' ari, H. (2016). Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 30-47.
- Ardipandanto, A., Prayudi, P., Budiman, A., & Fitri, A. (2020). Peranan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Lolowang, P. J. (2022). Peran Anggota Dprd Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 118-129.
- Makagansa, T., Gosal, R., & Singkoh, F. (2017). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Ode Srijuna, W. (2024). Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(2), 107-126.